



**BUPATI JOMBANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 54 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran, peningkatan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Jombang, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1/E);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

7. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
8. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
11. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
12. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh oleh Perangkat Daerah.
13. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
14. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
15. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara singkat dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
16. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
17. Sasaran/target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
18. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

19. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
20. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
21. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi: (1) hasil pengukuran kinerja, dan (2) Identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
22. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
23. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
24. Unit kerja Mandiri adalah unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah yang memiliki dan mengelola sendiri sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

#### **Pasal 3**

- (1) Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. IKU Pemerintah Kabupaten;
  - b. IKU Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Pemilihan dan penetapan IKU dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. IKU Pemerintah Kabupaten dengan mempertimbangkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - b. IKU Organisasi Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA).

### **BAB III PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### **Pasal 4**

IKU Pemerintah Daerah digunakan untuk:

- a. Perencanaan jangka menengah;
- b. Perencanaan tahunan;
- c. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. Evaluasi kinerja pemerintah daerah; dan
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

#### **Pasal 5**

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan IKU.

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

#### **Pasal 7**

- (1) IKU Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) IKU Organisasi Perangkat Daerah Jombang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Jombang melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 5 September 2019  
**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 5 September 2019  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**



**AKH JAZULI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 54 /E**

Lampiran I : PERATURAN BUPATI JOMBANG  
 NOMOR : 54 Tahun 2019  
 TANGGAL : 5 September 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

**A. VISI : “BERSAMA MEWUJUDKAN JOMBANG YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING”**

**B. MISI**

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional.
2. Mewujudkan Masyarakat Jombang Yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya.
3. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri.

**C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

TUJUAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENGAMPU
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Transparan dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang Berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi oleh KEMENPAN RB dan atau PMPRB	Kemenpan RB	- SETDA - Inspektorat - BAPPEDA

TUJUAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENGAMPU
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	2. Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \sqrt[3]{I \text{ kesehatan} \times I \text{ pendidikan} \times I \text{ pengeluaran}} \times 100$ Keterangan: IPM = Indeks Pembangunan Manusia $I_{\text{kesehatan}}$ = Indeks kesehatan $I_{\text{pendidikan}}$ = Indeks pendidikan $I_{\text{pengeluaran}}$ = Indeks pengeluaran	Badan Pusat Statistik	- BAPPEDA - SETDA
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan	3. Indeks Kualitas Permukiman	Indeks Kualitas Permukiman adalah indikator Komposit dari rumah tangga dengan Akses Sanitasi Layak, Akses Air Minum Layak, Penanganan Area Genangan dan Penanganan Rumah tidak Layak Huni	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
4. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Jombang yang Religius dan Berbudaya	4. Indeks Kesalehan Sosial	Indeks Kesalehan Sosial adalah indikator Komposit dari aspek sikap peduli, aspek sikap memberi, aspek menghargai perbedaan, aspek tidak memaksakan nilai, aspek tidak menghina nilai yang berbeda, aspek keterlibatan dalam demokrasi, aspek keterlibatan dalam <i>good government</i> aspek pencegahan kekerasan, aspek keterlibatan dalam konservasi (pemeliharaan lingkungan) dan aspek keterlibatan dalam restorasi (perbaikan lingkungan)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

TUJUAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENGAMPU
5. Menurunkan Tingkat Kemiskinan	5. Tingkat Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin tahun } n}{\text{Jumlah Penduduk tahun } n} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik	Dinas Sosial
6. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah	6. Pertumbuhan Ekonomi	<p>Persentase pertumbuhan PDRB (Ekonomi):</p> $\frac{\text{PDRB ADHK } n - \text{PDRB ADHK } n - 1}{\text{PDRB ADHK } n - 1} \times 100\%$ <p>Keterangan:  n = Realisasi PDRB ADHK Tahun Berjalan  n-1 = Realisasi PDRB ADHK Tahun lalu</p>	Badan Pusat Statistik	BAPPEDA

**D. INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	1. Nilai SAKIP	Nilai hasil evaluasi Implementasi SAKIP oleh KEMENPAN RB	- SETDA - Inspektorat - BAPPEDA	- SETDA - Inspektorat - BAPPEDA
		2. Opini BPK	Hasil Opini BPK	- BPKAD - Inspektorat	- BPKAD - Inspektorat
		3. Nilai LPPD	Hasil evaluasi penyelenggaraan Pemeritahan Kabupaten Jombang oleh Kementerian Dalam Negeri	SETDA	SETDA
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rata – rata Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan di Pemerintah Kabupaten Jombang	SETDA	SETDA
3.	Meningkatnya Profesionalitas Pegawai	5. Indeks Profesionalitas Aparatur	Indeks Profesionalitas Aparatur yaitu: Jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator.  $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$	BKDPP	BKDPP

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP <sub>i</sub> = Indeks Profesionalisme ke-I IP1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin		
4.	Meningkatnya Derajat Pendidikan	6. Indeks pendidikan	$= \frac{I H L S + I R L S}{2}$ Keterangan : <i>I HLS = Indeks Harapan Lama Sekolah</i> <i>I RLS = Indeks Rata - Rata Lama Sekolah</i>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	7. Indeks Kesehatan	$I_{kesehatan} = \frac{A H H - A H H \text{ min}}{A H H \text{ maks} - A H H \text{ min}}$ Keterangan : <i>AHH = Angka Harapan Hidup</i> <i>AHH maks = Angka Harapan Hidup Maksimal</i> <i>AHH min = Angka Harapan Hidup Minimal</i>	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
6.	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	8. Indeks Daya Beli	$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}$ <p>Keterangan :            I = Indeks komponen            In = Indeks komponen            Pengeluaranmin = pengeluaran terendah            Pengeluaran maks = pengeluaran tertinggi</p>	Badan Pusat Statistik	BAPPEDA
7.	Meningkatnya Kesenjangan dan Keadilan Gender	9. Indeks Pembangunan Gender	<p><i>IPG = Rasio IPM Perempuan dan IPM Laki - laki</i></p> $IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki} - \text{Laki}}$ <p><i>IPM Perempuan = Indeks Pembangunan Perempuan</i>  <i>IPM Laki - Laki = Indeks Pembangunan Laki - laki</i></p>	Dinas PPKB, PPPA	Dinas PPKB, PPPA
8.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman	10. Indeks Infrastruktur Permukiman	<p>= (Indeks Pemenuhan Air Minum Layak x 20%) + (Indeks Pemenuhan Sanitasi Layak x 20%) + (Indeks Penanganan Kawasan Kumuh x 20%) + (Indeks Rumah Layak Huni x 20%) + (Indeks Layanan Pengelolaan Sampah x 20%)</p>	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$= 30\% \text{ IPA} + 30\% \text{ IPU} + 40\% \text{ ITL}$ Keterangan: <i>IPA : Indeks Pencemaran Air</i> <i>IPU : Indeks Pencemaran Udara</i> <i>ITL : Indeks Tutupan Lahan</i>	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
9.	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Ketentraman, Keamanan, Ketertiban Umum dan Kesadaran Berbudaya	12. Angka Kriminalitas	$\frac{\text{Jumlah Tindak Kriminal Yang Terjadi Selama 1 Tahun}}{\text{Jumlah Seluruh Penduduk}} \times 10.000$	Kepolisian Resort Jombang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>- Satuan Polisi Pamong Praja</li> </ul>
		13. Persentase Penanganan Potensi Konflik SARA Tidak Menjadi Konflik	$\frac{\text{Jumlah Potensi Konflik SARA yang ditangani}}{\text{Jumlah potensi Konflik SARA yang terjadi}} \times 100\%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		14. Persentase Seni Budaya Yang Dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Seni Budaya Lokal Yang Dilestarikan}}{\text{Jumlah Seni Budaya Lokal}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10.	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	15. Jumlah Penduduk Miskin	$\text{Jumlah Penduduk Miskin tahun } - n$	Dinas Sosial	Dinas Sosial

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
11.	Meningkatnya Investasi Daerah	16. Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	<p>Persentase Peningkatan Realisasi Investasi :</p> $= \frac{n - (n - 1)}{(n - 1)} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>n = Realisasi Investasi Tahun Berjalan n-1 = Realisasi Investasi Tahun Lalu</p>	DPMPTSP	DPMPTSP
12.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	17. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$= \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik	Dinas Tenaga Kerja
13.	Meningkatnya Kunjungan Wisata	18. Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan tahun - n	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata
14.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	19. Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	<p>Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan adalah rata-rata pertumbuhan ADHK kategori Pertanian , Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian, Kategori industri Pengolahan dan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor.</p> $R = \frac{R1 + R2 + R3}{3}$ <p>R1 = Pertumbuhan PDRB ADHK kategori pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian. R2 = Pertumbuhan PDRB ADHK kategori industri Pengolahan. R3 = Pertumbuhan PDRB ADHK Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor</p>	BPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pertanian</li> <li>- Dinas Peternakan</li> <li>- Dinas Perdagangan dan Perindustrian</li> </ul>

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
15.	Meningkatnya Daya Dukung Infrastruktur Untuk Daya Saing	20. Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur = (Indeks Kondisi Ruas Jalan x 40%) + (Indeks Ketersediaan Air Irigasi x 30%) + (Indeks Pemenuhan SPM Bina Konstruksi x 10%) + (Indeks Kualitas Layanan Transportasi x 10%) + (Indeks Kesesuaian Tata Ruang x 10%)	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perumahan dan Permukiman	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perumahan dan Permukiman

**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**

Lampiran II : PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : 54 Tahun 2019  
TANGGAL : 5 September 2019

---

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### 1. Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang

INSTANSI	: <b>Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang</b>
VISI	: Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing
MISI	: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Profesional
TUJUAN	: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Publik
TUGAS	: Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif
FUNGSI	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;</li><li>2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;</li><li>3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;</li><li>4. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan</li><li>5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li></ol>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/ FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Hukum	Nilai LPPD	Nilai LPPD Tahun - n	Laporan Kegiatan	Bagian Administrasi Pemerintahan
		Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Rata - rata Nilai Sinergitas Kecamatan Tahun - n	Laporan Kegiatan	Bagian Administrasi Pemerintahan
		Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Jumlah Kebijakan Bidang Administrasi Kesra yang dilaksanakan -----X100% Jumlah Kebijakan Bidang Administrasi Kesra yang ditetapkan	Laporan Kegiatan	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
		Persentase Produk Hukum yang dipublikasikan	Jumlah Rancangan Produk Hukum yang dipublikasikan ----- x 100% Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan	Laporan Kegiatan	Bagian Hukum

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/ FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan Barang/ Jasa	Persentase kebijakan bidang Administrasi pembangunan yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Kebijakan bidang administrasi pembangunan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kebijakan bidang Administrasi pembangunan yang ditetapkan}} \times 100\%$	Laporan Kegiatan	Bagian Administrasi Pembangunan
		Persentase peningkatan realisasi pelaksanaan administrasi pembangunan daerah	$\frac{(\text{Realisasi pelaksanaan pembangunan tahun } n - \text{ Realisasi pelaksanaan pembangunan tahun } n - 1)}{\text{Realisasi pelaksanaan pembangunan tahun } n - 1}} \times 100\%$	Laporan Kegiatan	Bagian Administrasi Pembangunan
		Persentase Kebijakan Bidang Administrasi perekonomian yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Kebijakan bidang administrasi perekonomian yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kebijakan Bidang administrasi Perekonomian yang ditetapkan}} \times 100$	Laporan Kegiatan	Bagian Administrasi Perekonomian

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/ FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik	$\frac{\text{Jumlah paket pekerjaan yang diproses di SPSE}}{\text{Jumlah Rencana paket pekerjaan yang akan di proses di SPSE}} \times 100\%$	Laporan Kegiatan	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
3.	Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan bidang Umum dan Perlengkapan, Hubungan Masyarakat dan Protokol serta Organisasi	Indeks kepuasan layanan pemenuhan sarana prasarana	Nilai Indeks Kepuasan Layanan Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Bagian Umum dan Perlengkapan
Indeks Kepuasan layanan kehumasan dan Keprotokolan		Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kehumasan dan Keprotokolan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	
NILAI SAKIP Pemerintah Daerah		Nilai Evaluasi SAKIP tahun - n	LHE Implementasi SAKIP KEMENPAN RB	Bagian Organisasi	
Nilai IKM Kabupaten Jombang		Nilai rata - rata IKM Unit Pelayanan Kabupaten Jombang	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi	

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/ FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Nilai IKM SETDA	Nilai rata - rata Indeks Kepuasan Layanan Pemenuhan sarana dan Prasarana dan Indeks Kepuasan Layanan Kehumasan dan Keprotokolan tahun - n	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi
		Nilai SAKIP SETDA	Nilai Evaluasi SAKIP SETDA tahun - n	LHE Implementasi SAKIP SETDA oleh Tim APIP	Bagian Organisasi

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****2. Inspektorat Kabupaten Jombang**

INSTANSI : **Inspektorat Kabupaten Jombang**

VISI : Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional

TUJUAN : Mewujudkan Pengawasan Yang Profesional dan Akuntabel

TUGAS : Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

FUNGSI :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan Pemerintah Daerah;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa;
- c. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, sidak dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government* serta pelayanan publik;
- d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Hasil Pengawasan yang berkualitas dan akuntabel	Persentase Tindak Lanjut Selesai	$\frac{\text{Jumlah TL dengan status Selesai}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi}} \times 100\%$	Laporan Rekapitulasi Pemantauan Hasil Temuan Pengawasan semesteran	IRBAN
		Persentase LK SKPD sesuai SAP	$\frac{\text{Jumlah LK SKPD sesuai SAP}}{\text{Jumlah LK SKPD}} \times 100\%$	Laporan Hasil Reviu	IRBAN
		Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP	Laporan Hasil Pemetaan SPIP	IRBAN
		Jumlah OPD yang telah melaksanakan pembangunan ZI menuju WBK / WBBM	Jumlah OPD yang telah melaksanakan pembangunan ZI menuju WBK / WBBM	Laporan Hasil Penilaian	IRBAN
		Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	Laporan Nilai RB	IRBAN
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase SAKIP OPD dengan kategori nilai minimal BB	$\frac{\text{Jumlah OPD yang nilai evaluasi SAKIP nya minimal BB}}{\text{jumlah seluruh OPD yang dievaluasi}} \times 100\%$	Laporan Hasil Evaluasi	IRBAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang**

**INSTANSI** : **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang**

**VISI** : Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing

**MISI** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional

**TUJUAN** : Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan dukungan hasil penelitian dan pengembangan

**TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan

**FUNGSI** :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan	$= \frac{\text{Jumlah OPD yang dokumen Perencanannya selaras}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$	Laporan LKE pada komponen keselarasan	Kabid Praswil, Kabid Ekonomi, Kabid PPM
	Persentase Capaian Kinerja Program kategori baik	$= \frac{\text{Jumlah Capaian Indikator Kinerja Program dengan kategori Baik}}{\text{Jumlah seluruh indikator kinerja program}} \times 100\%$	Monev Tribulan OPD	Kabid Perencanaan dan Dalev
2. Meningkatnya rekomendasi dokumen penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase rekomendasi dokumen penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan daerah	$= \frac{\text{Jumlah rekomendasi dokumen penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah rekomendasi dokumen penelitian dan pengembangan yang dikeluarkan}} \times 100\%$	Dokumen perencanaan pembangunan sektoral, Penelitian, dan pengembangan	Kabid Litbang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang**

**INSTANSI** : **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang**

**VISI** : Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing

**MISI** : Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius dan berbudaya

**TUJUAN** : Meningkatkan Derajat Pendidikan

**TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan dan bidang Kebudayaan

**FUNGSI** :

1. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan bidang kebudayaan;
5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
6. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Paud	Jumlah Penduduk Yang Bersekolah PAUD -----X100% Jumlah penduduk kelompok usia 4-6 tahun	Profil Pendidikan	Bidang Pembinaan Paud dan Dikmas
		APK SD/MI/ Paket A	Jumlah siswa jenjang SD/Paket A setara -----X100% Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	Profil Pendidikan	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
		APM SD/MI/ Paket A	Jumlah siswa jenjang SD usia 7 - 12 tahun -----X100% Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	Profil Pendidikan	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
		APK SMP/MTs/ Paket B	Jumlah siswa jenjang SMP/Paket B setara -----X100% Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	Profil Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP

		APM SMP/MTs/ Paket B	Jumlah siswa jenjang SMP usia 13-15 tahun -----X100% Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	Profil Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP
		Sekolah SD/MI Terakreditasi A	Jumlah Sekolah Terakreditasi A SD/MI -----x 100 Jumlah Sekolah SD/MI	Profil Pendidikan	Bidang Pembinaan SD dan Bidang Ketenagaan
		Sekolah SMP/MTs Terakreditasi A	Jumlah Sekolah Terakreditasi A SMP/MTs -----x 100 Jumlah Sekolah SMP/MTs	Profil Pendidikan	Bidang Pembinaan SD dan Bidang Ketenagaan
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai SAKIP tahun n	Laporan Kegiatan	Seluruh Bidang
3.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	Jumlah seni dan budaya yang dilestarikan ----- x 100 Jumlah Seni dan Budaya	Laporan Kegiatan	Bidang Kebudayaan

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### 5. Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

1. INSTANSI : **Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang**
2. VISI : Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing
3. MISI : Masyarakat Jombang yang berkualitas, religius dan berbudaya
4. TUJUAN : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
5. TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesehatan
6. FUNGSI :
  1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
  4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup fungsinya; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat = (Jumlah "y"/12 - jumlah n) Kategori Keluarga Sehat : a. Tidak Sehat = <0,5 b. Pra Sehat = 0,5 - 0,8 c. Sehat = > 0,8	Rekap Survey Keluarga Sehat dari Puskesmas	Kepala Dinas Kesehatan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****6. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang**

**INSTANSI** : **Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang**

**VISI** : Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing

**MISI** : Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri

**TUJUAN** :

1. Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja serta penguatan informasi pasar kerja dan pelayanan penempatan transmigrasi
2. Meningkatkan kompetensi keterampilan dan produktifitas tenaga kerja dan masyarakat
3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan fungsi sarana/prasarana pendukung Dinas Tenaga Kerja

**TUGAS** : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang di bidang tenaga kerja

**FUNGSI** :

1. Penyusunan kebijakan operasional dalam rangka perencanaan yang mendukung pembangunan;
2. Pelaksanaan kegiatan dengan skala prioritas dan strategi dalam rangka pencapaian sasaran; dan
3. Penyelenggaraan dan fasilitasi di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, perluasan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial dan persyaratan kerja.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/ FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	$\frac{\sum \text{Angkatan Kerja}}{\sum \text{Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$	Disnaker, BPS, BKK, IPK Online, SISKOTKLN, TKA Online, BLK, LPK, Perusahaan	Bidang Penempatan Perluasan Kerja dan Transmigrasi dan Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja
2.	Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Iklim Usaha yang Kondusif	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	$\frac{\sum \text{Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan}}{\sum \text{Kasus yang Dilaporkan (Dicatatkan)}} \times 100\%$	Disnaker, Perusahaan, Serikat Pekerja	Bidang Hubungan Industrial & Syarat Kerja

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang**

- INSTANSI** : **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang**
- VISI** : Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing
- MISI** : 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional  
2. Mewujudkan Masyarakat Jombang yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya  
3. Meningkatkan Daya Saing Perekonimian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri
- TUJUAN** : Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk daya saing
- TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- FUNGSI** : a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;  
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;  
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;  
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;  
e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;  
f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan  
g. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

<b>NO</b>	<b>KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jalan total}}$	Hasil survey dan laporan data	Bidang Bina Marga
2	Meningkatnya kinerja sistem irigasi	Persentase kinerja sistem irigasi	Jumlah 6 (enam) parameter kinerja sistem irigasi	Hasil survey dan laporan data	Bidang Sumber Daya Air
3	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase pemenuhan SPM Bina Kontruksi</li> <li>- Rasio rekomendasi teknis IMB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>\frac{\text{Jumlah pemenuhan layanan informasi jasa konstruksi}}{\text{7 layanan informasi}} \times 100\%</math></li> <li>- <math>\frac{\text{Jumlah rekomendasi teknis IMB bangunan}}{\text{Total bangunan}}</math></li> </ul>	Hasil survey dan laporan data	Bidang Tata Bangunan dan Bina Kontruksi
4	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	$\frac{\text{Luas pemanfaatan ruang yang sesuai}}{\text{total luas rencana pemanfaatan ruang}} \times 100\%$	Hasil survey dan laporan data	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang**

- INSTANSI** : **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang**
- VISI** : Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing
- MISI** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Professional
- TUJUAN** : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Prima sesuai Kebutuhan dan Harapan Masyarakat.
- TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil
- FUNGSI** :
1. Perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  4. Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;
  5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  6. Pembinaan penyelenggaraan, fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Penerbitan KK	$\frac{\text{Jumlah penerbitan KK sampai tahun } x}{\text{Jumlah KK yang terdaftar sampai tahun } x} \times 100\%$	Data Rekap Cakupan Kinerja Dispendukcapil Jombang	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk,
		Persentase Cakupan Penerbitan KTP	$\frac{\text{Jumlah wajib KTP yang memiliki KTP el sampai tahun } x}{\text{Wajib KTP sampai tahun } x} \times 100\%$	Data Rekap Cakupan Kinerja Dispendukcapil Jombang	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk,
		Persentase Cakupan Penerbitan KIA	$\frac{\text{Jumlah KIA yang diterbitkan sampai tahun } x}{\text{Jumlah anak usia 0-17 thn yang memiliki akta lahir}} \times 100\%$	Data Rekap Cakupan Kinerja Dispendukcapil Jombang	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk,
		Persentase pemanfaatan data administrasi kependudukan oleh instansi lain	$\frac{\text{Jumlah instansi yang melaksanakan pemanfaatan data adminduk}}{\text{Jumlah SKPD yang melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data adminduk}} \times 100\%$	Data Rekap Cakupan Kinerja Dispendukcapil Jombang	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
		Persentase pelaporan data administrasi kependudukan	$\frac{\text{Jumlah laporan data administrasi kependudukan yang dikirimkan}}{\text{Jumlah permintaan laporan data administrasi kependudukan}} \times 100\%$	Data Rekap Cakupan Kinerja Dispendukcapil Jombang	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

	Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 thn yang memiliki akta lahir ----- x 100% Jumlah Seluruh anak usia 0-18 th	Data Rekap Cakupan Kinerja Dispendukcapil Jombang	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
	Persentase Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan ----- x 100% Jumlah Pengajuan Akta	Data Rekap Cakupan Kinerja Dispendukcapil Jombang	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
	Persentase Cakupan Penerbitan Akta Perceraian	Jumlah Penerbitan Akta Perceraian -----x 100% Jumlah Pengajuan Akta	Data Rekap Cakupan Kinerja Dispendukcapil Jombang	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
	Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kematian	Jumlah Penerbitan Akta Kematian ----- x 100% Jumlah Pengajuan Akta	Data Rekap Cakupan Kinerja Dispendukcapil Jombang	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****9. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang**

**INSTANSI** : **Dinas Pertanian Kabupaten Jombang**

**VISI** : Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing

**MISI** : Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri

**TUJUAN** : Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian

**TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pertanian.

**FUNGSI** :

1. Perumusan kebijakan di bidang pertanian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian;
5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang pertanian;
6. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang pertanian; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya produksi pertanian	Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (ton) : - Padi - Jagung - Kedelai - Cabe - Bawang Merah - Tembakau - Tebu - Kopi	$\text{Luas panen (ha)} \times \text{produktivitas (kw/ha)}$	- BPS  - Dinas Pertanian	Kepala Dinas Pertanian
2.	Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Nilai Tukar Petani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan - NTP Tanaman Pangan - NTP Hortikultura - NTP Perkebunan	$\frac{\text{Harga yang diterima petani}}{\text{Harga yang dibayar petani}}$	Dinas Pertanian	Kepala Dinas Pertanian

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### 10. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang

- INSTANSI** : **Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang**
- VISI** : Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing
- MISI** : Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius dan berbudaya  
Meningkatkan daya saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi unggulan Lokal dan Industri
- TUJUAN** : Meningkatnya Daya Beli Masyarakat  
Meningkatnya PDRB Sektor industri
- TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perdagangan dan bidang perindustrian
- FUNGSI** :
- a. Perumusan kebijakan di Bidang perdagangan dan perindustrian;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang perdagangan dan perindustrian;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan perindustrian;
  - d. Pelaksanaan administrasi Dinas perdagangan dan perindustrian;
  - e. Penyelenggaraan fungsi- fungsi pelaksana urusan Pemerintah Daerah di bidang perdagangan dan perindustrian;
  - f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi – fungsi pelaksana urusan Pemerintahan daerah di bidang perdagangan dan bidang perindustrian; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP	Nilai AKIP tahun n	Laporan Hasil Reviu AKIP dari Inspektorat	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2	Meningkatnya Volume perdagangan	Volume Perdagangan Perusahaan Kecil Menengah yang terfasilitasi (Rp)	Ekspor – impor + omset SIUP (Perusahaan Kecil Menengah yang terfasilitasi (Rp)	- Data Primer - Perusahaan/Laporan	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	Meningkatnya PAD sektor pasar	Persentase PAD Pasar Daerah	$\frac{\text{Target PAD Pasar Daerah}}{\text{Potensi PAD Pasar Daerah}} \times 100\%$	Data Survey Potensi Pasar Daerah	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4	Meningkatnya nilai tambah hasil produk industri kecil dan menengah	Nilai tambah hasil produk industri kecil dan menengah	Nilai produksi – Nilai Biaya	Laporan Tribulan Industri Kecil dan Menengah	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****11. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang**

- INSTANSI** : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang
- VISI** : BERSAMA MEWUJUDKAN JOMBANG YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING
- MISI** : 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional  
2. Mewujudkan Masyarakat Jombang Yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya  
3. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri
- TUJUAN** : 1. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik  
2. Meningkatkan Investasi Daerah
- TUGAS** : Membantu Bupati Dalam Melaksanakan Fungsi Pelaksana Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Penanaman Modal
- FUNGSI** : 1. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu;  
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu;  
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu;  
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;  
6. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan  
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perizinan	Nilai SKM layanan perizinan tahun (n)	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>- Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi</li> </ul>
2	Realisasi Investasi Daerah	Nilai Investasi daerah	Nilai realisasi investasi tahun (n)	Laporan Data Realisasi Investasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal</li> <li>- Bidang Pengendalian dan Pengawasan</li> <li>- Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****12. Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang**

**INSTANSI** : Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang

**VISI** : Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing

**MISI** : Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan industri

**TUJUAN** : Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk daya saing

**TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perhubungan

**FUNGSI** :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1	Meningkatnya keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi	Indeks kualitas layanan transportasi	% Pemenuhan perlengkapan jalan x 25% + % Pemenuhan penerangan jalan x 25% + % Angkutan yang laik jalan x 25% + % kepuasan masyarakat terhadap layanan parkir x 25%)	Database Dinas Perhubungan	Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian Operasional dan Perparkiran, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****13. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang**

**INSTANSI** : **Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang**

**VISI** : BERSAMA MEWUJUDKAN JOMBANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING

**MISI** : Mewujudkan Masyarakat Jombang Yang Berkualitas, Religius Yang Berbudaya

**TUJUAN** : Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman

**TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di perumahan dan kawasan permukiman

**FUNGSI** :

- 1 Perumusan Kebijakan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 2 Pelaksanaan kebijakan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 3 Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 4 Pelaksanaan Administrasi Dinas Perumahan dan Permukiman;
- 5 Penyelenggaraan Fungsi-fungsi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 6 Pembinaan Penyelenggaraan Fungsi-Fungsi Pelaksana Urusan Pemerintah Daerah dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- 7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman	1 Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak	$\Sigma \frac{\text{Jml. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak}}{\text{Jml. Rumah Tangga} + (n+1)} \times 100\%$	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Perumahan dan Permukiman
		2 Persentase rumah tangga dengan akses air minum yang layak	$\Sigma \frac{\text{Jml. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak}}{\text{Jml. Rumah Tangga} + (n+1)} \times 100\%$	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	
		3 Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	$\Sigma \frac{\text{Panjang Drainase yang Tertangani}}{\text{Panjang Total Drainase}} \times 100\%$	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	
		4 Persentase Rumah Layak Huni	$\Sigma \frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah} + (n+1)} \times 100\%$	Bidang Perumahan	
		5 Pesentase kawasan kumuh	$\Sigma \frac{\text{Kawasan Kumuh} - \text{Kawasan kumuh Tertangani}}{\text{Luas Kawasan Kumuh} + (n+1)} \times 100\%$	Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman	

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****14. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang**

**INSTANSI : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang**

**VISI : Bersama mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing**

**MISI : Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius dan berbudaya**

**TUJUAN : Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat Jombang**

**TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro**

**FUNGSI :**

- a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro,
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- f. Pembinaan Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya koperasi Berkinerja baik	Persentase koperasi berkinerja baik	$\frac{\text{Jumlah koperasi berkinerja baik}}{\text{Jumlah koperasi di Kabupaten Jombang}} \times 100$	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.	Meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro	Pertumbuhan pendapatan Pelaku usaha mikro	$\frac{\text{Jumlah pendapatan pelaku UM tahun } n - \text{Jumlah pendapatan pelaku UM tahun } n-1}{\text{Jumlah pendapatan pelaku UM tahun } n-1} \times 100\%$	Bidang Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****15. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang**

**INSTANSI** : **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang**

**VISI** : Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing

**MISI** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional

**TUJUAN** : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang professional, Akuntabel, transparan dan efektif serta penyelenggaraan Layanan Publik yang berkualitas

**TUGAS** : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsipenunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

**FUNGSI** :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan assetdaerah;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Ketepatan Waktu dalam Penyusunan APBD Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	Persentase ketepatan dalam penyampaian APBD dan P-APBD	Dokumen Perda dan Perbup APBD	Bidang Anggaran
		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Pertanggungjawaban APBD	Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir	Dokumen Raperda Pertanggungjawaban APBD	Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan
		Persentase Toleransi Deviasi Penyerapan Belanja OPD	$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Anggaran}} \times 100\%$	Laporan keuangan/ Laporan pertanggungjawaban APBD	Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan
		Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan BMD	Ketepatan Penyampaian Laporan BMD	Laporan BMD	Bidang Aset Daerah
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP BPKAD Tahun - n	LHE Implementasi SAKIP BPKAD Tahun - n	Bidang Sekretariat

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****16. Dinas Peternakan Kabupaten Jombang**

- INSTANSI** : **Dinas Peternakan Kabupaten Jombang**
- VISI** : Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing
- MISI** : Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Merata
- TUJUAN** : Meningkatkan PDRB Sektor Pertanian
- TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Peternakan
- FUNGSI** :
1. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas peternakan;
  2. Pelaksanaan pembinaan teknis dan penyuluhan dalam rangka peningkatan produksi peternakan;
  3. Pelaksanaan pembinaan teknis, identifikasi masalah penyakit hewan dan pelayanan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner;
  4. Perumusan kebijakan teknis operasional, program dan pembinaan penyebaran dan pengembangan usaha peternakan;
  5. Pelaksanaan Identifikasi masalah, penyiapan dan penataan redistribusi peternakan;
  6. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan usaha dan pemberian rekomendasi Izin Usaha Peternakan;
  7. Penyusunan pusat informasi agribisnis, penyebaran informasi pasar dan promosi hasil peternakan;
  8. Perumusan kebijakan pengembangbiakan dan penyebaran ternak, fasilitasi produksi bibit dan peningkatan mutu genetik ternak serta pelestarian plasma nutfah; dan
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Populasi dan Produksi Hasil Peternakan	Persentase pertumbuhan populasi peternakan	$\frac{(\text{Populasi Tahun } n) - (\text{Populasi Tahun } n - 1)}{\text{Populasi Tahun } n - 1}$	Laporan Data Statistik Peternakan	Kepala Dinas Peternakan
		Persentase pertumbuhan Produksi Hasil Peternakan	$\frac{(\text{Produksi Tahun } n) - (\text{Produksi Tahun } n - 1)}{\text{Produksi Tahun } n - 1}$		

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****17. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang**

- INSTANSI** : **Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang**
- VISI** : Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing
- MISI** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional
- TUJUAN** : Meningkatkan profesionalisme Aparatur
- TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- FUNGSI** :
1. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
  5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas kinerja dan kompetensi aparatur	1. Persentase ASN yang mempunyai nilai SKP berkategori baik	$\frac{\text{ASN yang mempunyai Penilaian Prestasi Kerja minimal berkategori baik tahun - n}}{\text{Jumlah ASN tahun - n}} \times 100\%$	Laporan rekapitulasi penilaian SKP seluruh PNS.	Bidang Kinerja Aparatur
		2. Persentase Pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi	$\frac{\text{Jumlah kebutuhan aparatur yang ditetapkan Kemenpan RB}}{\text{Jumlah kebutuhan sesuai usul formasi yang disampaikan ke KemenpanRB}} \times 100\%$	Laporan pelaksanaan penyusunan formasi dan pengadaan ASN	Bidang Pengadaan, Profesi dan Informasi
		3. Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lulus dengan predikat minimal memuaskan	$\frac{\text{Jumlah aparatur yang mengikuti diklat tahun-n lulus dengan predikat minimal memuaskan}}{\text{Jumlah ASN yang mengikuti diklat tahun-n}} \times 100\%$	Laporan pelaksanaan penyelenggaraan diklat dan peningkatan kompetensi	Bidang Pendidikan dan Pelatihan
		4. Persentase Penataan ASN sesuai dengan kompetensi	$\frac{\text{Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100\%$ <p>(data awal 90 % )</p>	Laporan Mutasi dan penempatan jabatan ASN	Bidang Mutasi dan Promosi

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****18. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang**

- INSTANSI** : **Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang**
- VISI** : Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing.
- MISI** : 1. Mewujudkan Masyarakat Jombang yang Berkualitas Religius dan Berbudaya  
2. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri
- TUJUAN** : 1. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat  
2. Meningkatnya PDRB Sektor Perikanan
- TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pangan dan bidang perikanan.
- FUNGSI** : a. Perumusan kebijakan di Bidang Pangan dan bidang Perikanan;  
b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pangan dan Bidang Perikanan;  
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pangan dan Bidang Perikanan;  
d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;  
e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pangan dan bidang perikanan;  
f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang pangan dan Bidang Perikanan; dan  
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Cadangan Pangan Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Cadangan Pangan Masyarakat	$\frac{(\text{Realisasi Cadangan Pangan Tahun } n - \text{Realisasi Tahun } n-1)}{\text{Realisasi Tahun } n-1} \times 100\%$	Laporan cadangan pangan di lumbung pangan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Tingkat Stabilitas Harga dan Pasokan Harga	$CVKRI = \left[ 2 - \frac{CVKRI}{CVKTI} \right] \times 100\%$ <p>Keterangan: CVKRI = Koefisien keragaman Realisasi untuk Harga dan Pasokan komoditas ke CVKTI = Koefisien keragaman Target untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i</p>	Laporan data informasi pasokan, harga dan akses pangan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.	Meningkatkan Diversifikasi, Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Skor Pola pangan Harapan (PPH)	Skor PPH = Prosentase AKG x Bobot masing2 kelompok pangan (Skor PPH Kelompok Padi-padian + Umbi-Umbian+.....)	Laporan skor PPH konsumsi	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Persentase Pangan Segar yang aman dikonsumsi	$\frac{\text{Jumlah Sampel Pangan Segar diuji yang memenuhi syarat}}{\text{Total Sampel Pangan Segar}} \times 100\%$	Laporan uji laboratorium	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

3.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan	$\frac{(\text{Jumlah Produksi Ikan TB Thn.n} - \text{Jumlah Produksi Ikan TB Thn.n-1})}{\text{Jumlah Produksi Ikan TB Thn.n-1}} \times 100 \%$	Info Data Statistik Perikanan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
4.	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Rupiah)	NT= Nilai Produk Olahan-Nilai produksi perikanan segar	Volume Produksi Hasil Olahan Poklaksar Kab. Jombang	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP OPD	Nilai AKIP Tahun n	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****19. Dinas Sosial Kabupaten Jombang**

**INSTANSI** : **Dinas Sosial Kabupaten Jombang**

**VISI** : Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing

**MISI** : Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius dan berbudaya

**TUJUAN** : Menurunkan angka PMKS

**TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial

**FUNGSI** :

1. Perumusan kebijakan dibidang Sosial
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Sosial
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial
5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial
6. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PENGHITUNGAN / PENJELASAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
Meningkatnya keberdayaan PMKS	Prosentase PMKS yang Mandiri	$\frac{\Sigma \text{Jumlah PMKS yang Mandiri}}{\Sigma \text{Jumlah PMKS}} \times 100$	BPS, Dinsos	Kepala Dinsos

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****20. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Jombang**

**INSTANSI** : **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang**

**VISI** : Bersama mewujudkan Jombang yang berkarakter dan berdaya saing

**MISI** : 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional  
2. Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius, dan berbudaya

**TUJUAN** : 1. Meningkatkan Kualitas layanan kearsipan  
2. Meningkatkan fungsi perpustakaan sebagai sarana pendukung budaya literasi guna meningkatkan kecerdasan masyarakat

**TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan

**FUNGSI** : 1. Perumusan Kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;  
2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;  
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;  
4. Pelaksanaan administrasi Dinas perpustakaan dan kearsipan;  
5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;  
6. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan; dan  
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI/ RUMUS PENGHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	$\frac{(\text{Jumlah pengunjung perpustakaan tahun } n) - (\text{jumlah pengunjung tahun } n-1)}{\text{Jumlah pengunjung perpustakaan tahun } n-1} \times 100\%$	Buku pengunjung perpustakaan	Dinas Pepustakaan dan Kearsipan
2.	Meningkatnya Tata kelola Kearsipan Daerah	Persentase OPD yang menerapkan Tata Kelola Kearsipan Secara Baik dan Benar	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah menerapkan kearsipan secara baik dan benar}}{\text{Jumlah OPD Se Kabupaten Jombang}} \times 100\%$	Laporan kegiatan	Dinas Pepustakaan dan Kearsipan

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### **21. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang**

- INSTANSI** : **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang**
- VISI** : Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing
- MISI** : Mewujudkan Masyarakat Jombang yang Berkualitas, Religius, dan Berbudaya.
- TUJUAN** : 1. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang  
2. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender
- TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- FUNGSI** :
- a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - d. Pelaksanaan administrasi Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - e. Penyelenggaraan fungsi – fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi – fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang – bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Menurunnya angka kelahiran	TFR (Total Fertility Rate)	$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ <p>ASFRI : ASFR untuk wanita pada kelompo usia ke-i i = kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49</p>	BPS, BKKBN	KEPALA DINAS DPPKB & PPPA
2.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Pertumbuhan IPG	$\frac{IPG \text{ tahun } n - IPG \text{ tahun } n - 1}{IPG \text{ Tahun } n - 1}$	BPS, BAPPEDA	KEPALA DINAS DPPKB & PPPA
3.	Meningkatnya layanan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase korban yang mendapatkan layanan secara tuntas sesuai SPM	$\frac{\text{Jumlah korban yang mendapatkan layanan secara tuntas sesuai SPM}}{\text{Jumlah korban keseluruhan}} \times 100\%$	DPPKB&PPPA POLRES	KEPALA DINAS DPPKB & PPPA
4.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	Hasil Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	LHE Evaluasi Implementasi SAKIP DPPKB&PPPA	KEPALA DINAS DPPKB & PPPA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****22. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang**

- INSTANSI** : **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang**
- VISI** : Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing
- MISI** : 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional  
2. Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religious, dan berbudaya.
- TUJUAN** : 1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja reformasi birokrasi.  
2. Meningkatnya daya beli masyarakat.
- TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- FUNGSI** :
1. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  6. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1	Meningkatnya kemandirian desa	Jumlah Desa Mandiri	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)	Bidang PKPM Bidang PEM Bidang BINA PEMDES Bidang PEMBANGUNAN DESA	DPMD
2	Meningkatnya level kinerja instansi pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai SAKIP	Sekretariat Bidang PKPM Bidang PEM Bidang BINA PEMDES Bidang PEMBANGUNAN DESA	DPMD

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****23. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang**

**INSTANSI** : **Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang**

**VISI** : Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing

**MISI** : Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius, dan berbudaya

**TUJUAN** : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

**TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup

**FUNGSI** :

1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup
5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang lingkunganhidup;
6. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya capaian standar lingkungan	Persentase pemenuhan standar lingkungan	$\frac{\text{Jumlah sampel kualitas badan air dan udara ambient yang memenuhi baku mutu}}{\text{Total uji kualitas badan air dan udara ambient}} \times 100\%$	1. Hasil uji lab kualitas air dan udara	1. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan 2. Bidang Tata Lingkungan 3. UPTD Lab. LH
		Persentase capaian target penambahan tutupan lahan	$\frac{\text{Luasan peningkatan tutupan lahan}}{\text{Target peningkatan tutupan lahan}} \times 100$	1. Data IKLH	1. Bidang Konservasi Lingkungan 2. Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau
2	Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan persampahan	$\frac{\text{Jumlah sampah yang tertangani} + \text{jumlah sampah yang berkurang}}{\text{Jumlah timbulan sampah}} \times 100\%$	1. Dokumen Laporan Pengelolaan Sampah DLH Kab. Jombang	1. Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau 2. UPTD Pengelolaan Sampah

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****24. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Jombang**

**INSTANSI** : **Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Jombang**

**VISI** : Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing

**MISI** : Mewujudkan Masyarakat Jombang Yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya

: Meningkatkan Daya Saing Perekonomian daerah, Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal

**TUJUAN** : 1. Meningkatkan Kualitas Kepemudaan

2. Meningkatkan Budaya Olahraga

3. Meningkatkan Kunjungan Wisatawan

**TUGAS** : Membantu Bupati Melaksanakan Fungsi pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga

**FUNGSI** :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga dan bidang pariwisata
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga dan bidang pariwisata
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan, olahraga dan bidang pariwisata
- d. pelaksanaan administrasi dinas kepemudaan, olahraga dan bidang pariwisata
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan bidang pariwisata
- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan bidang pariwisata
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya jumlah Desa/kelurahan yang menyelenggarakan Olahraga secara Rutin	Jumlah Desa/kelurahan yang menyelenggarakan Olahraga Secara Rutin i	Jumlah Desa/kelurahan yang menyelenggarakan Olahraga Secara Rutin Tahun N	Laporan Kinerja	Bidang Olahraga
2	Meningkatnya pemuda berprestasi	Jumlah pemuda yang berprestasi	Jumlah Pemuda Berprestasi Tahun ke N	Laporan Kinerja	Bidang pemuda
3	Peningkatan jumlah kunjungan wisata	Persentase Peningkatan jumlah kunjungan wisata	Jumlah kunjungan wisata tahun N dikurangi jumlah kunjungan wisata tahun N-1 dibagi jumlah kunjungan wisata tahun n-1 dikali 100%	Laporan kegiatan	Bidang Destinasi Pariwisata

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang**

- INSTANSI** : **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang**
- VISI** : Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing
- MISI** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional
- TUJUAN** : Mewujudkan sistem pendukung layanan Set. DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD
- TUGAS** : Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD
- FUNGSI** :
- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
  - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
  - d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

<b>Kinerja Utama/ Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Penjelasan/Formulasi Penghitungan</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Sekretariat Dewan	1. Bag. Perundang-undangan 2. Bag. Persidangan 3. Bagian Keuangan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****26. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang**

- INSTANSI** : **Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang**
- VISI** : Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing
- MISI** : Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius, berbudaya.
- TUJUAN** : - Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.  
- Meningkatnya AKIP dan Kualitas Layanan Publik.
- TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, ketentraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- FUNGSI** : 1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman serta penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat ;  
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman serta penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;  
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketentraman serta perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;  
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;  
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Menurunnya tingkat pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dan ketertiban umum Serta Perlindungan Masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta ketertiban umum Serta Perlindungan Masyarakat	<p>Jumlah penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada serta trantibum yang diselesaikan</p> <p>----- X 100%</p> <p>Jumlah penangan Pelanggaran Perda dan Perkada serta trantibum yang dilaporkan</p>	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang; Bag Adm Pemerintahan; DPMPD; BAPENDA; Masyarakat	Bidang Perlindungan Masyarakat, Bidang Penegakan Perda, bidang Ketertiban Umum dan Sumber Daya Apratur

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang**

**INSTANSI** : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang**

**VISI** : Jombang Sejahtera Untuk Semua

**MISI** : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Beragama

**TUJUAN** : Memulihkan Fungsi Sosial Masyarakat korban Bencana

**TUGAS** : membantu Bupati untuk menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang pencegahan, penanggulangan bencana, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi akibat bencana

**FUNGSI** :

1. Penyusunan, perumusan rencana program dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. Pelaksanaan urusan sekretariat;

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase desa tangguh bencana	$\frac{\text{Jumlah desa yang memiliki sistem ketangguhan bencana}}{\text{Jumlah Desa rawan bencana}} \times 100 \%$	PUSDALOPS BPBD	BPBD JOMBANG
2	Tercukupinya kebutuhan unsur penanggulangan bencana dan kebakaran	Persentase unsur <i>stakeholders</i> Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	$\frac{\text{Jumlah Unsur stake holders PB yang pernah terlibat}}{\text{Jumlah unsur } \textit{stakeholders} \textit{ PB yang dapat dilibatkan}} \times 100\%$	PUSDALOPS BPBD	BPBD JOMBANG
		Persentase Peralatan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	$\frac{\text{Jumlah Peralatan yang tersedia}}{\text{Jumlah Peralatan yang dibutuhkan}} \times 100\%$	PUSDALOPS BPBD	BPBD JOMBANG
		Persentase logistik	$\frac{\text{Jumlah logistik yang tersedia}}{\text{Jumlah logistik yang dibutuhkan}} \times 100\%$	PUSDALOPS BPBD	BPBD JOMBANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang**

**INSTANSI** : **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang**

**VISI** : Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing

**MISI** : Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius dan berbudaya

**TUJUAN** : Mewujudkan masyarakat yang rukun , toleran dan tentram

**TUGAS** : Membantu bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah Kabupaten Jombang di bidang integrasi bangsa, budaya, organisasi sosial politik dan hubungan antar lembaga serta kewaspadaan.

**FUNGSI** :

- 1 Pengkoordinasian dengan pengaturan kegiatan kerjasama, mengintegrasikan dan mensinkronkan pelaksanaan pembinaan di bidang integrasi bangsa, budaya, organisasi sosial dan hubungan antar lembaga serta kewaspadaan ;
- 2 Pelaksanaan perencanaan, program, pembinaan operasional dan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan di bidang integrasi bangsa, budaya, organisasi sosial dan hubungan antar lembaga serta kewaspadaan ;
- 3 Pelaksanaan fasilitasi kegiatan partai politik, organisasi masyarakat, profesi dan lembaga swadaya masyarakat dan membantu pelaksanaan kegiatan pemilihan umum, pemasyarakatan sistem politik dalam negeri, demokrasi dan pendidikan politik masyarakat ;
- 4 Pengkajian, penganalisaan dan penyelesaian segala permasalahan yang timbul di bidang pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, kemasyarakatan, profesi, kesatuan bangsa, politik, ham dan hubungan antar lembaga ;
- 5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan monitoring tentang situasi dan kondisi daerah di bidang integrasi bangsa, budaya, organisasi sosial dan hubungan antar lembaga serta kewaspadaan ;
- 6 Pelaksanaan kegiatan pembinaan, sosialisasi, pelatihan ,penyuluhan, kursus-kursus dan penataran-penataran di bidang integrasi bangsa, budaya, organisasi sosial dan hubungan antar lembaga serta kewaspadaan.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1	Meningkatnya kewaspadaan terhadap konflik sosial	Persentase penanganan konflik sosial	$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun}}{\text{Jumlah seluruh penduduk}} \times 10.000$	POLRES	Bidang Kewaspadaan
2.	Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat	Tidak terjadi konflik kelompok	$\frac{\text{Jumlah konflik kelompok}}{\text{Jumlah Potensi konflik kelompok}} \times 100$	Polres ,FKUB dan FPK	Bidang Integrasi Bangsa
3	Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam bidang sosial politik	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	$\frac{\text{Jumlah Pemilih DPT}}{\text{DPT}} \times 100\%$	KPU, PANWASLU, KECAMATAN	Bidang Budaya, Ormas, Orpol dan Hubungan Antar Lembaga
		Persentase Orkesmas, Orprof, Orpol dan LSM yang aktif	$\frac{\text{Jumlah Orkesmas, Orprof, orpol dan LSM yang aktif}}{\text{Jumlah Orkesmas, Orprof ,orpol dan LSM yang terdaftar}} \times 100$	Data Orkesmas, Orprof ,orpol dan LSM yang terdaftar	Bidang Budaya, Ormas, Orpol dan Hubungan Antar Lembaga
4.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Dokumen SAKIP OPD	Sekretariat Sub. Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### 29. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

**INSTANSI** : **Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang**

**VISI** : Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing

**MISI** : Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang Bersih dan Professional

**TUJUAN** : Meningkatkan Kinerja Keuangan dan Birokrasi

**TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pendapatan daerah.

**FUNGSI** :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
4. Pembinaan Teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Potensi	$\frac{\Sigma \text{ Realisasi pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\Sigma \text{ Potensi}} \times 100\%$	Laporan data Potensi dan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****30. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang**

**INSTANSI** : **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang**

**VISI** : Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing

**MISI** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional

**TUJUAN** : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel

**TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

**FUNGSI** :

- a. Perumusan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Indeks Kebijakan Internal, Tata Kelola dan Layanan SPBE	Laporan Kegiatan	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, Bidang Layanan <i>E - Government</i>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****31. Rumah Sakit Umum Daerah Jombang**

- INSTANSI** : **Rumah Sakit Umum Daerah Jombang**
- VISI** : Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing
- MISI** : Mewujudkan Masyarakat Jombang Yang Religius, Berkualitas dan Mandiri
- TUJUAN** : Mewujudkan pelayanan Rumah sakit yang memenuhi standar dengan mengutamakan keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan
- TUGAS** : Membantu Bupati dalam melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.
- FUNGSI** :
- a. Penyelenggaraan pelayanan medis
  - b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis
  - c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan.
  - d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan.
  - e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
  - f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
  - g. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang professional	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja	RSUD Kabupaten Jombang	Direktur RSUD
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan pendidikan dan penelitian di RSUD Kabupaten Jombang	Nilai Standar Pelayanan Minimal	Jumlah keseluruhan nilai hasil Standar Pelayanan Minimal Unit Pelayanan yang dinilai pada tahun n -----x100% Jumlah nilai maximal standar pelayanan minimal pada tahun ke n	RSUD Kabupaten Jombang	Direktur RSUD
		Nilai Indeks Kepuasan pelanggan	Nilai hasil Survey Kepuasan Pelanggan	RSUD Kabupaten Jombang	Direktur RSUD

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****32. Rumah Sakit Umum Daerah Ploso**

**INSTANSI** : **Rumah Sakit Umum Daerah Ploso**

**VISI** : Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing.

**MISI** : Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius dan berbudaya.

**TUJUAN** : Mewujudkan Pelayanan Rumah Sakit yang memenuhi standar.

**TUGAS** : Melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan untuk masyarakat dengan tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan menggunakan upaya pengobatan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu untuk peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan.

**FUNGSI** :

- a. Penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- g. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Ploso	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) layanan kesehatan rujukan di RSUD Ploso	Realisasi jumlah SPM yang sesuai standar -----x 100% Jumlah indikator SPM	Hasil survey	Direktur RSUD Ploso
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Total dari nilai persepsi per unsur -----x nilai penimbang Total unsur yang terisi	Hasil Survey	Direktur RSUD Ploso

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### 33. Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

- INSTANSI** : **Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang**
- VISI** : Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing
- MISI** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional
- TUJUAN** : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik
- TUGAS** : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- FUNGSI** :
1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
  2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
  3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
  4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
  5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
  6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
  7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
  8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Diwek	Nilai Sinergitas Kecamatan Diwek Minimal BAIK	$\frac{\text{Jumlah Nilai Komponen Sinergitas}}{\text{Jumlah komponen Sinergitas}}$	Hasil Penilaian Sinergitas	Camat Diwek

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****34. Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang**

**INSTANSI** : **Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang**

**VISI** : Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

**MISI** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

**TUJUAN** : Meningkatkan kualitas layanan publik

**TUGAS** : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

**FUNGSI** :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Gudo	Nilai Sinergitas Kecamatan Gudo Minimal BAIK	Jumlah Nilai Komponen Sinergitas ----- Jumlah komponen Sinergitas	Hasil Penilaian Sinergitas	Camat Gudo

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### 35. Kecamatan Perak Kabupaten Jombang

**INSTANSI** : Kecamatan Perak Kabupaten Jombang

**VISI** : Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

**MISI** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

**TUJUAN** : Meningkatkan kualitas layanan publik

**TUGAS** : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

**FUNGSI** :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Perak	Nilai Sinergitas Kecamatan Perak Minimal BAIK	$\frac{\text{Jumlah Nilai Komponen Sinergitas}}{\text{Jumlah komponen Sinergitas}}$	Hasil Penilaian Sinergitas	Camat Perak

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### 36. Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang

INSTANSI : **Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang**

VISI : Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

TUJUAN : Meningkatkan kualitas layanan publik

TUGAS : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;  
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;  
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;  
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;  
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;  
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;  
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;  
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan  
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bandar Kedungmulyo	Nilai Sinergitas Kecamatan Bandar Kedungmulyo Minimal BAIK	$\frac{\text{Jumlah Nilai Komponen Sinergitas}}{\text{Jumlah komponen Sinergitas}}$	Hasil Penilaian Sinergitas	Camat Bandar Kedungmulyo

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### 37. Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang

INSTANSI : **Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang**

VISI : Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

TUJUAN : Meningkatkan kualitas layanan publik

TUGAS : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;  
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;  
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;  
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;  
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;  
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;  
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;  
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan  
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tembelang	Nilai Sinergitas Kecamatan Tembelang Minimal BAIK	$\frac{\text{Jumlah Nilai Komponen Sinergitas}}{\text{Jumlah komponen Sinergitas}}$	Hasil Penilaian Sinergitas	Camat Tembelang

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### 38. Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang

INSTANSI : Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang

VISI : Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

TUJUAN : Meningkatkan kualitas layanan publik

TUGAS : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;  
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;  
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;  
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;  
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;  
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;  
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;  
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan  
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Megaluh	Nilai Sinergitas Kecamatan Tembelang Minimal BAIK	$\frac{\text{Jumlah Nilai Komponen Sinergitas}}{\text{Jumlah komponen Sinergitas}}$	Hasil Penilaian Sinergitas	Camat Megaluh

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### 39. Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang

INSTANSI : **Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang**

VISI : Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

TUJUAN : Meningkatkan kualitas layanan publik

TUGAS : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;  
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;  
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;  
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;  
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;  
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;  
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;  
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan  
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Ploso	Nilai Sinergitas Kecamatan Ploso Minimal BAIK	$\frac{\text{Jumlah Nilai Komponen Sinergitas}}{\text{Jumlah komponen Sinergitas}}$	Hasil Penilaian Sinergitas	Camat Ploso

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### 40. Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang

INSTANSI : **Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang**

VISI : Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

TUJUAN : Meningkatkan kualitas layanan publik

TUGAS : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;  
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;  
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;  
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;  
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;  
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;  
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;  
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan  
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Plandaan	Nilai Sinergitas Kecamatan Plandaan Minimal BAIK	$\frac{\text{Jumlah Nilai Komponen Sinergitas}}{\text{Jumlah komponen Sinergitas}}$	Hasil Penilaian Sinergitas	Camat Plandaan

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### 41. Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang

**INSTANSI** : Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang

**VISI** : Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

**MISI** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

**TUJUAN** : Meningkatkan kualitas layanan publik

**TUGAS** : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

**FUNGSI** :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kabuh	Nilai Sinergitas Kecamatan Kabuh Minimal BAIK	$\frac{\text{Jumlah Nilai Komponen Sinergitas}}{\text{Jumlah komponen Sinergitas}}$	Hasil Penilaian Sinergitas	Camat Kabuh

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****42. Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang**

**INSTANSI** : Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang

**VISI** : Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

**MISI** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

**TUJUAN** : Meningkatkan kualitas layanan publik

**TUGAS** : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

**FUNGSI** :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kudu	Nilai Sinergitas Kecamatan Kudu Minimal BAIK	$\frac{\text{Jumlah Nilai Komponen Sinergitas}}{\text{Jumlah komponen Sinergitas}}$	Hasil Penilaian Sinergitas	Camat Kudu

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### 43. Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang

**INSTANSI** : Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang

**VISI** : Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

**MISI** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

**TUJUAN** : Meningkatkan kualitas layanan publik

**TUGAS** : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

**FUNGSI** :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Ngusikan	Nilai Sinergitas Kecamatan Ngusikan Minimal BAIK	$\frac{\text{Jumlah Nilai Komponen Sinergitas}}{\text{Jumlah komponen Sinergitas}}$	Hasil Penilaian Sinergitas	Camat Ngusikan

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### 44. Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang

**INSTANSI** : Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang

**VISI** : Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

**MISI** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

**TUJUAN** : Meningkatkan kualitas layanan publik

**TUGAS** : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

**FUNGSI** :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Peterongan	Nilai Sinergitas Kecamatan Peterongan Minimal BAIK	$\frac{\text{Jumlah Nilai Komponen Sinergitas}}{\text{Jumlah komponen Sinergitas}}$	Hasil Penilaian Sinergitas	Camat Peterongan

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### 45. Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang

INSTANSI : **Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang**

VISI : Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

TUJUAN : Meningkatkan kualitas layanan publik

TUGAS : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;  
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;  
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;  
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;  
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;  
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;  
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;  
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan  
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Jogoroto	Nilai Sinergitas Kecamatan Jogoroto Minimal BAIK	$\frac{\text{Jumlah Nilai Komponen Sinergitas}}{\text{Jumlah komponen Sinergitas}}$	Hasil Penilaian Sinergitas	Camat Jogoroto

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### 46. Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang

INSTANSI : **Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang**

VISI : Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

TUJUAN : Meningkatkan kualitas layanan publik

TUGAS : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;  
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;  
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;  
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;  
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;  
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;  
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;  
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan  
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Sumobito	Nilai Sinergitas Kecamatan Sumobito Minimal BAIK	$\frac{\text{Jumlah Nilai Komponen Sinergitas}}{\text{Jumlah komponen Sinergitas}}$	Hasil Penilaian Sinergitas	Camat Sumobito

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### 47. Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang

**INSTANSI** : Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang

**VISI** : Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

**MISI** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

**TUJUAN** : Meningkatkan kualitas layanan publik

**TUGAS** : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

**FUNGSI** :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kesamben	Nilai Sinergitas Kecamatan Kesamben Minimal BAIK	$\frac{\text{Jumlah Nilai Komponen Sinergitas}}{\text{Jumlah komponen Sinergitas}}$	Hasil Penilaian Sinergitas	Camat Kesamben

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### 48. Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang

INSTANSI : **Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang**

VISI : Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

TUJUAN : Meningkatkan kualitas layanan publik

TUGAS : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;  
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;  
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;  
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;  
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;  
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;  
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;  
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan  
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Ngoro	Nilai Sinergitas Kecamatan Ngoro Minimal BAIK	$\frac{\text{Jumlah Nilai Komponen Sinergitas}}{\text{Jumlah komponen Sinergitas}}$	Hasil Penilaian Sinergitas	Camat Ngoro

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### 49. Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

**INSTANSI** : Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

**VISI** : Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

**MISI** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

**TUJUAN** : Meningkatkan kualitas layanan publik

**TUGAS** : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

**FUNGSI** :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Mojowarno	Nilai Sinergitas Kecamatan Mojowarno Minimal BAIK	$\frac{\text{Jumlah Nilai Komponen Sinergitas}}{\text{Jumlah komponen Sinergitas}}$	Hasil Penilaian Sinergitas	Camat Mojowarno

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### 50. Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang

**INSTANSI** : Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang

**VISI** : Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

**MISI** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

**TUJUAN** : Meningkatkan kualitas layanan publik

**TUGAS** : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

**FUNGSI** :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bareng	Nilai Sinergitas Kecamatan Bareng Minimal BAIK	$\frac{\text{Jumlah Nilai Komponen Sinergitas}}{\text{Jumlah komponen Sinergitas}}$	Hasil Penilaian Sinergitas	Camat Bareng

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### 51. Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang

**INSTANSI** : Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang

**VISI** : Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

**MISI** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

**TUJUAN** : Meningkatkan kualitas layanan publik

**TUGAS** : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

**FUNGSI** :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Wonosalam	Nilai Sinergitas Kecamatan Wonosalam Minimal BAIK	$\frac{\text{Jumlah Nilai Komponen Sinergitas}}{\text{Jumlah komponen Sinergitas}}$	Hasil Penilaian Sinergitas	Camat Wonosalam

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### 52. Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang

INSTANSI : **Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang**

VISI : Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

TUJUAN : Meningkatkan kualitas layanan publik

TUGAS : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;  
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;  
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;  
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;  
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;  
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;  
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;  
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan  
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Jombang	Nilai Sinergitas Kecamatan Jombang Minimal BAIK	$\frac{\text{Jumlah Nilai Komponen Sinergitas}}{\text{Jumlah komponen Sinergitas}}$	Hasil Penilaian Sinergitas	Camat Jombang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****53. Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang**

INSTANSI : **Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang**

VISI : Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

TUJUAN : Meningkatkan kualitas layanan publik

TUGAS : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;  
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;  
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;  
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;  
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;  
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;  
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;  
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan  
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Mojoagung	Nilai Sinergitas Kecamatan Mojoagung Minimal BAIK	$\frac{\text{Jumlah Nilai Komponen Sinergitas}}{\text{Jumlah komponen Sinergitas}}$	Hasil Penilaian Sinergitas	Camat Mojoagung

BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB